

## Penyederhanaan surat dakwaan dalam proses peradilan pidana Indonesia

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/bo/uiibo/detail.jsp?id=100343&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

[Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Karena itu negara mewajibkan kepada aparturnya untuk terus melakukan pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban.

<br><br>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang amat penting dalam menciptakan ketenteraman, keamanan dan ketertiban

masyarakat dan negara. Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum agar dapat mencapai keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam masyarakat adalah kualitas profesional dari aparatur penegak hukum itu sendiri, dalam usaha preventif dan lebih-lebih dalam pelaksanaan tugas represif. Sebagai aparatur negara penegak hukum yang langsung berhubungan dengan masyarakat ialah polisi, jaksa penuntut umum, dan hakim.

<br><br>

Tentunya sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dan syarat apa yang harus dipenuhi untuk membuat surat dakwaan yang baik dalam arti sederhana, cermat, jelas, dan lengkap itu.

Hal ini telah mendorong peneliti untuk melihat kenyataan dalam praktik yang dilakukan oleh para jaksa penuntut umum mengenai sesuatu yang menyangkut teknik, cara, bentuk dan segala masalah yang berkaitan dengan surat dakwaan serta membahasnya berdasarkan teori dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai perkara pidana yang ditangani dengan surat dakwaan yang sederhana, jelas, oermat dan lengkap itu agar mencapai sasaran yang diinginkan dalam proses penuntutan.

<br><br>

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekaligus untuk mengetahui tentang:

1. Peranan jaksa penuntut umum sehubungan dengan fungsi surat dakwaan dalam proses perkara pidana.

2. Pembeneran suatu pernyataan bahwa, kurangnya kemampuan dan penguasaan jaksa penuntut umum terhadap materi perkara serta ketentuan perundang-undangan yang menyangkut perkara tersebut, menyebabkan kesembronoan dalam pembuatan surat dakwaan, yang berakibat menggagalkan tujuan penuntutan suatu perkara pidana.
3. Bentuk-bentuk dan susunan surat dakwaan yang dapat menghindari lolosnya terdakwa dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya.
4. Alasan-alasan surat dakwaan yang dibatalkan dalam praktik pengadilan, dan inti diktumnya.
5. Syarat-syarat dan teknik pembuatan surat dakwaan yang sederhana, cermat, jelas dan lengkap.
6. Syarat dan batasan tentang kemungkinan adanya perubahan surat dakwaan dalam proses penuntutan., ]